



RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN MILITER UTAMA

2026



021-29832987



admin@dilmiltama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR



www.dilmiltama.go.id





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2026

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer Utama dalam rangka mewujudkan visi yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”

Dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Tugas Pokok Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Fungsi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yaitu fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangannya;
2. Fungsi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
3. Fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
4. Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2026 sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		1	2	3	4					
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara tingkat banding yang mendekati 3 bulan	√	√	√	√	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara tingkat banding	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	Rp. 128.136.000,-
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdapat jumlah perkara tingkat banding yang mendekati 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	
3.	Melaksanakan persidangan perkara tingkat banding dengan tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan perkara tingkat banding dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	
4.	Memutus perkara tingkat banding tidak lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	

5.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perbedaan pendapat yang mendekati 3 bulan	√	√	√	√	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perbedaan pendapat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	Rp. 128.136.000,-
6.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdapat jumlah perkara perbedaan pendapat yang lebih dari 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	
7.	Melaksanakan persidangan perkara perbedaan pendapat dengan tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan perkara perbedaan pendapat dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	
8.	Memutus perkara perbedaan pendapat tidak lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Perkara perbedaan pendapat yang diputus tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	
9.	Menginventarisir Salinan putusan yang akan dikirimkan kepada Papera, Orjen TNI / Pengadilan Pengaju	√	√	√	√	Terdatanya Salinan putusan yang akan dikirimkan kepada Papera, Orjen TNI / Pengadilan Pengaju	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Pengiriman berkas perkara dan Salinan putusan kepada Papera, Orjen TNI dan Pengadilan Pengaju	Rp. 128.136.000,-
10.	Mengirimkan Salinan putusan kepada Papera, Orjen TNI /	√	√	√	√	Salinan putusan perkara diterima oleh Papera, Orjen TNI /	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Pengiriman berkas perkara dan Salinan putusan kepada Papera,	

	Pengadilan Pengaju tepat waktu					Pengadilan Pengaju dengan tepat waktu			Orjen TNI dan Pengadilan Pengaju	
11	Mengunggah putusan perkara pada direktori putusan	√	√	√	√	Putusan perkara yang terunggah pada Direktori Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Pengunggahan putusan perkara pada direktori putusan	Rp. 128.136.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	91	91	91	91

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		1	2	3	4					
1.	Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	Rp. 6.639.616.000,-
2.	Menyusun Job Description Tim Survei Kepuasan Masyarakat	√				Job Description TIM SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
3.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan	√				Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan	Peningkatan Dukungan Manajemen serta	Survei Kepuasan Masyarakat	

	Kebutuhan Survei Kepuasan Masyarakat						Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI		
4.	Melaksanakan SKM	√	√	√	√	Kuisisioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
5.	Mendata dan Merekap Hasil SKM	√	√	√	√	Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
6.	Menyusun Laporan Hasil SKM	√	√	√	√	Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
7.	Melakukan Evaluasi Berdasarkan Hasil SKM dan Melakukan Tinjauan Manajemen	√	√	√	√	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		a. 663161	94	94	94	94
		b. 663162	90	90	90	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		a. 663161	23	46	68	91
		b. 663162	20	40	60	80
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		1	2	3	4					
1.	Mengunggah dokumen kepegawaian terkini dari masing-masing personil terkait Kompetensi, Kinerja, Kualifikasi dan Disiplin	√	√	√	√	Terselesaikannya penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Rp. 6.639.616.000,-
2.	Mengunggah dokumen terkait pelaksanaan anggaran beserta pertanggungjawabannya pada aplikasi SAKTI	√	√	√	√	Terselesaikannya penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 dan DIPA 05	


3.	Mengunggah dokumen keuangan terkait Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK pada aplikasi SAKTI	√	√	√	√	Terselesaikannya penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05	
4.	Mengunggah dokumen penatausahaan BMN, pemanfaatan BMN, serta pengelolaannya pada aplikasi E-SADEWA	√	√	√	√	Terselesaikannya penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL MONEV (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		1	2	3	4			
1.	Monitoring dan Evaluasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	√	√	√	√	Proses perkara pidana militer tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara pidana militer yang diselesaikan pada tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat di Pengadilan Militer Utama
2.	Monitoring dan Evaluasi persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	√	√	√	√	Jumlah salinan putusan perkara tingkat banding yang yang Dikirim ke Papera dan Orjen TNI/ Pengadilan Pengaju dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pengiriman salinan putusan ke Papera dan Orjen TNI/ Pengadilan Pengaju
3.	Monitoring dan Evaluasi persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	√	√	√	√	Jumlah putusan perkara pidana militer yang diunggah pada direktori putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pengunggahan putusan perkara pidana militer pada direktori putusan
4.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	√	√	√	√	Nilai Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada aplikasi e-survey Ditjen Badilmiltun
5.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	√	√	√	√	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada aplikasi myASN
6.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA	Program Dukungan Manajemen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN

	a. 663161 b. 663162	√ √	√ √	√ √	√ √	01 (663161) dan DIPA 05 (663162)		
7.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran a. 663161 b. 663162	√ √	√ √	√ √	√ √	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (663161) dan DIPA 05 (663162)	Program Dukungan Manajemen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Nilai NKPA pada aplikasi Monev Kemenkeu
8.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	√	√	√	√	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada aplikasi E-SADEWA

Jakarta, 9 Januari 2026
Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto
Laksamana Muda TNI